

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis yang meliputi Visi, Misi, Tujuan serta cara pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan kami uraikan dalam bab ini. Berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2016.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah rencana pembangunan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Sleman yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RKJMD) Kabupaten Sleman, yaitu Visi, Misi Bupati Sleman terpilih Tahun 2016–2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk periode 5 (lima) tahun 2016 - 2021.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas, yang dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis SKPD selanjutnya digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

2.2 VISI DAN MISI

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sejalan dengan visi Kabupaten Sleman yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021"**

Visi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera selaras dengan visi pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan DIY sejahtera, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Visi mandiri selaras dengan visi nasional mandiri dan visi DIY mandiri yang berarti dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Visi lebih berbudaya se

Selaras dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong royong dan visi DIY berbudaya, dimana budaya yang ada di masyarakat diharapkan tetap memegang teguh pada kepribadian bangsa yang mengutamakan sifat kegotongroyongan. Visi terintegrasikannya sistem *e-government* adalah merupakan alat untuk menuju masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya.

Terwujudnya dari Visi yang telah dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dan acuan bagi segenap aparat yang bertugas di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Kemudian untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yang merupakan kumpulan pernyataan yang harus dilaksanakan guna mewujudkan Visi dimaksud.

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang

ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sejalan dengan misi Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi

kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan penguatan mitigasi bencana agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif dan nyaman.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proposional.

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1 TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program.

Tujuan merupakan penjabaran ataupun implementasi dari pernyataan isi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan, diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dapat secara lebih tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam mencapai visi dan misinya dengan mempertimbangan sumberdaya yang dimiliki, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang belum dapat secara utuh dan sinergis dengan kebijakan daerah yang ditetapkan kemudian. Perumusan tujuan strategis tersebut juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur, serta memberikan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi untuk dapat mengukur sendiri sejauh mana Visi dan Misi Organisasi telah dapat dicapai, mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu setiap tujuan yang ditetapkan, akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana strategis, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan ketertiban masyarakat.

2.3.2. SASARAN.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi beserta indikator sasaran disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2016
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan <i>e-govt</i> yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.			
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Daerah	1) Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti	100%
		2) Predikat LAKIP	A
		3) Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.			
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Keamanan Pangan Pada Target Usaha	1) Jumlah Tempat Usaha Industri Makanan Yang Di Monitor	30
		2) Jumlah Usaha Yang Dimonitor	15
Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.			
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	a. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	1) Nilai Produksi Industri	0,5%

	b. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan	1) Meningkatkan nilai ekspor	42.000.000. US \$
	c. Meningkatkan iklim UKM yang kondusif dan kualitas kelembagaan	1) Jumlah koperasi yang aktif	10
		2) Jumlah wirausaha baru	105
Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.			
4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Meningkatnya Industri Ramah Lingkungan	1) Peserta Bimtek Industri Ramah Lingkungan	20
Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proposional.			
5. Meningkatkan Ketertiban Masyarakat	a. Meningkatnya Kepemilikan Sertifikat UMKM	1) Jumlah Sertifikat UMKM Difasilitasi	200

2.4. PERJANJIAN KINERJA 2016

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2016, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI TAHUN 2016

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	1 Penatausahaan Keuangan dan asset SKPD	Rp 27.280.000
		Predikat Nilai LAKIP	A	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 25.189.000
					2 Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Rp 18.631.000
					3 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD	Rp 18.126.000
1 Penyusunan renstra SKPD	Rp 34.209.000					
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah		

		Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 29.100.000
					2 Penyediaan makanan dan minuman	Rp 48.740.000
					3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp 76.175.000
					4 Penyediaan bahan dan jasa administrasi	Rp 298.359.000
					5 Penyediaan jasa langganan	Rp 141.500.000
					6 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rp 219.877.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Rp 265.700.000
					2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 275.960.000
					3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan dinas	Rp 7.550.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya	Rp 10.000.000
					2 Pengelolaan kepegawaian	Rp 42.280.800
					3 Pengelolaan dokumen	Rp 9.621.000

				Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1	penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengelolaan dokumen SKPD	Rp 31.360.000
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Rp. 285.210.000
					2	Penyusunan basis data	Rp 69.168.000
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	1	Pengelolaan website	Rp 15.123.500
2	Meningkatnya Keamanan pangan pada target usaha	Jumlah tempat usaha industri makanan yang dimonitor	30	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	1	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Rp 23.791.500
		Jumlah usaha yang dimonitor	15	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Rp 49.628.500

				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 2 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 3 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 4 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Rp 153.452.000 Rp 824.281.500 Rp 85.162.000 Rp 139.835.000
				Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2 Pelayanan Perijinan Perdagangan 3 Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 4 Penyelenggaraan dan pengembangan Kemetrolgian Daerah	Rp 56.467.000 Rp 9.662.000 Rp 9.746.500 Rp 874.825.000
3	Meningkatnya daya saing sektor industri	Nilai produksi industri	0,5%	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Pproduksi	1 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Rp 132.296.500

					2 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Rp 138.430.000
					3 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Rp 204.616.500
				Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	1 Pembinaan sentra industri	Rp 41.503.000
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Perencanaan pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi	
					a <i>Roadmap pengembangan sentra industri Kabupaten Sleman</i>	Rp 84.860.500
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 Pelatihan ketrampilan dan pengelolaan manajemen usaha bagi IK/RT di lingkungan pabrik rokok	Rp 90.045.500
					2 Pemanfaatan sumber daya bagi industri kecil dan menengah	Rp 119.461.500
					3 Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Rp 75.494.000

				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1	Penyusunan basis data	Rp.69.168.000
				Program Penegakan Hukum	1	Pengawasan perijinan usaha industri (TDI/IUI)	Rp 11.085.000
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Rp 90.474.000
					2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Rp 129.902.000
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	Pemantauan pengelolaan dana pemerintah baginusaha mikro kecil menengah	Rp 43.864.500
					2	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Rp 599.584.000
					3	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Rp 215.097.000

					4 Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Rp 8.184.000
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Rp 150.188.500
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1 Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Rp 304.120.500
4	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya nilai ekspor	42.000.000. US \$	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1 Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Rp 14.494.350
					2 Membangun jejaring dengan exportir	Rp 112.218.500
					3 Pembangunan promosi perdagangan internasional	Rp 719.320.000
				Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	1 Pelayanan perijinan perdagangan	Rp 9.662.000

5	Meningkatnya iklim UKM yang kondusif dan kualitas Kelembagaan	Jumlah koperasi yang aktif	10	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Rp 12.933.000
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2 Pembinaan formalisasi badan usaha kecil dan menengah	Rp 62.618.000
					1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Rp 17.764.000
					2 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Rp 88.194.500
					3 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Rp 61.598.500
					4 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Rp 102.971.000
					5 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Rp 28.886.500
					6 Penyelesaian permasalahan koperasi	Rp 35.992.000
				7 Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Rp 123.071.000	

				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Sosialisasi informasi permodalan dukungan penyediaan	Rp 10.490.000
					2 Peningkatan kerjasama antar lembaga jaringan	Rp 15.830.750
					3 Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Rp 29.285.000
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 Pemberdayaan ekonomi produktif	Rp 0
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD	Rp 173.015.500
					2 Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Rp 304.120.500
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Rp 131.480.500
		Jumlah wirausaha baru,	105			

				Program Penegakan Hukum	1 Pengawasan perijinan usaha perdagangan	Rp 32.961.900
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 Pelatihan ketrampilan usaha bagi keluarga miskin	Rp 80.058.000
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1 Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Rp 67.620.500
6	Meningkatnya industri ramah lingkungan	Peserta Bimtek industri ramah lingkungan	20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Pengembangan produksi ramah lingkungan.	Rp 40.865.400
7	Meningkatnya kepemilikan sertifikat UMKM	Jumlah sertifikat UMKM difasilitasi	200	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Penataan penguasaan, pemilikan ,penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp 24.330.250

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2016.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dianggap benar-benar bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan indikator sasaran beserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016, maka pada tahun 2016 ditetapkan 10 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
2.	Predikat LAKIP	A
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
4.	Jumlah usaha yang dimonitoring	15
5.	Nilai produksi industri	0,5%
6.	Nilai Ekspor	42.000.000 US\$
7.	Jumlah koperasi yang aktif	10
8.	Jumlah Wirausaha baru	105
9.	Peserta Bimtek Industri ramah lingkungan	20
10.	Jumlah sertifikat UMKM difasilitasi	200